

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Kapasitas Kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dalam Penyelenggaraan Layanan Darurat di Kota Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kapasitas kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dalam penyelenggaraan layanan darurat di Kota Semarang telah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan kerangka Grindle (1997), namun beberapa indikator masih belum sepenuhnya optimal. Pengembangan sumber daya manusia masih ditemukan gejala negatif seperti keterbatasan kuantitas personel, belum meratanya pelatihan, serta belum tersedianya keberlanjutan psikologis pada kondisi kerja petugas, namun kapasitas individu tetap mampu menopang fungsi pelayanan secara optimal pada operasional. Penguatan organisasi menunjukkan perkembangan yang relatif kuat secara struktural dan operasional, namun belum sepenuhnya optimal, tercermin dari beberapa gejala negatif seperti tidak adanya penghargaan berbasis kinerja dari organisasi, minimnya pembaruan sarana prasarana strategis, serta konsistensi individu yang belum terbangun. Adapun gaya kepemimpinan, mekanisme komunikasi, dan struktur komando telah berjalan relatif baik dalam mendukung efektivitas respons. Reformasi kelembagaan telah berjalan dengan menunjukkan kemampuan

beradaptasi terhadap perubahan risiko, regulasi, dan perkembangan teknologi dan telah berjalan meskipun belum optimal. Reformasi terlihat melalui pembaruan SOP, sistem monitoring berbasis kepuasan masyarakat, serta integrasi layanan darurat dalam platform digital kota (*command center*).

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Kapasitas Kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran dalam Penyelenggaraan Layanan Darurat di Kota Semarang.

Komitmen bersama dikategorikan sudah berjalan ditunjukkan melalui koordinasi lintas instansi yang sudah berjalan, solidaritas internal dan dukungan relawan. Kepemimpinan yang kondusif sudah berjalan optimal dalam membentuk kapasitas kelembagaan. Hal ini ditunjukkan melalui peran strategis dalam penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan berbasis pengalaman dan analisis situasional, serta legitimasi komando yang kuat di lapangan. Responsivitas peraturan dapat dikategorikan belum berjalan secara optimal dalam konsistensi implementasi. Hal ini ditunjukkan melalui keberadaan di lapangan menghadapi tekanan dari ekspektasi masyarakat yang semakin meluas, dan juga potensi penyimpangan prosedural akibat urgensi situasional.

4.2 Saran

1. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang perlu melakukan penataan ulang formasi dan distribusi personel damkar agar memenuhi standar minimal per regu sesuai regulasi nasional. Defisit personel tidak dapat dibiarkan sebagai kondisi adaptif permanen karena berpotensi menurunkan keselamatan petugas dan efektivitas respons. Perencanaan SDM harus berbasis analisis beban kerja riil, proyeksi risiko kota, serta skema regenerasi yang jelas untuk mencegah stagnansi akibat dominasi usia mendekati pensiun.
2. Mengingat tingginya tekanan psikologis dalam pekerjaan kebakaran, dukungan kesehatan mental tidak boleh bersifat wacana atau insidental. Perlu dibentuk mekanisme resmi seperti layanan konseling pasca insiden, asesmen psikologis berkala, serta protokol pemulihan mental. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi durasi dan kualitas pelatihan teknis agar tidak terjadi kesenjangan kompetensi akibat pemadatan waktu dan keterbatasan anggaran.
3. Pemerintah Kota Semarang perlu memprioritaskan pembaruan armada yang telah melewati usia ideal pakai serta mempertimbangkan pengadaan peralatan khusus seperti mobil tangga untuk penanganan kebakaran vertikal. Modernisasi infrastruktur operasional akan menutup *capability gap* dan meningkatkan daya respons terhadap risiko kebakaran yang semakin kompleks. Tanpa adanya modernisasi sarana prasarana, kapasitas kelembagaan akan stagnan dan bergantung pada improvisasi di lapangan.

4. Diperlukan kejelasan batas ruang lingkup layanan penyelamatan agar tidak terjadi perluasan ekspektasi masyarakat yang dapat melampaui kapasitas organisasi. Sosialisasi publik mengenai jenis layanan darurat yang menjadi kewenangan Damkar perlu diperkuat, disertai pengawasan internal yang konsisten untuk memastikan implementasi SOP berjalan efektif tanpa penyimpangan akibat tekanan situasional.